

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Korupsi menurut para ahli berdasarkan riset dan pengalamannya, menurut nurdjana (1990), korupsi berasal dari bahasa Yunani yang artinya “corruption” yang memiliki arti bahwa perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan juga hukum. Kartono (1983) mendefinisikan korupsi yaitu tingkah atau kelakuan salah satu individu yang menggunakan wewenang dan jabatan yang digunakan dalam mengambil suatu keuntungan demi kepentingan sendiri, dan merugikan kepentingan umum ataupun Negara. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan atau dengan maksud untuk memberikan keuntungan tidak resmi yang menggunakan hak pihak lain, dengan cara langsung salah dalam menggunakan posisi kedudukan yang sifatnya dengan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, yang saling berlawanan dengan kewajiban dan hak pihak lain. Pada saat ini dunia berbisnis di Indonesia tidak atau bukan berorientasi kepada kinerja keuangan saja akan tetapi perlu menunjukkan upaya untuk meningkatkan kredibilitas serta komitmen terhadap praktik bisnis yang bersih dan ber-etika yang baik. Dengan kenyataan bahwa perkembangan bisnis yang sangat pesat sering tidak diimbangi dengan menggunakan pengendalian internal yang baik. Dengan maraknya kasus korupsi yang menjerat perusahaan yang ada di Indonesia, membuktikan bahwa lemahnya tata kelola didalam perusahaan tersebut. (Tirtasari dan Hartomo, tahun 2019).

PT Waskita Beton Precast Tbk adalah dimana didalam perusahaan terdapat dugaan dengan kasus-kasus korupsi para pekerja fiktif subkontraktor didalam proyek-proyek yang dikelola oleh PT Waskita Karya dalam Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Direktur Utama PT Waskita Beton precast, Jarot Subana, Selasa (28/01/2020). Jarot bakal diperiksa sebagai saksi kasus

dugaan korupsi pekerja fiktif subkontraktor dalam proyek yang digarap PT Waskita Karya (persero). Jarot diduga merupakan salah satu pihak yang diduga mengetahui sengkaret kasus korupsi ini. Pemeriksaan kepada pegawai dan para pejabat ataupun mantan pejabat PT Waskita Karya dengan mencari tahu kasus dugaan korupsi yang telah ditafsirkan merugikan keuangan Negara sebesar Rp 186 miliar tersebut. Pada hari Kamis tanggal (21/11/2019) kemudian tim penyidik melakukan pemeriksaan kepada mantan kepala Divisi III PT Waskita Karya yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Jasa Marga, ungkap Desi. Dalam kasus ini, fathor Racham dan Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebar di Sumatera Utara, di Banten, di Jakarta, di Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, sampai Papua.

Korupsi pada saat ini masih menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website Transparency Internasional*, <https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/>. Pada tahun 2018 Indonesia memperoleh skor Indeks persepsi sebesar 38 dan menduduki peringkat 89 dari 180 negara pada tahun 2018. Peringkat yang terbilang rendah ini, mengindikasikan bahwa masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

Korupsi saat ini masih menjadi musuh bersama karena memiliki dampak kerugian didalam keuangan maupun non keuangan yang dapat merugikan kehidupan perusahaan. Untuk itu, perlu meminimalisir kinerja berbisnis yang tidak ber-etika didalam suatu mekanisme dapat juga disebut dengan Good Corporate Governance. (GCG) yaitu dapat dikatakan sebagai pengendalian internal yang sangat diperlukan untuk meminimalisir segala bentuk perilaku yang menyimpang yang ada di dalam perusahaan, termasuk tindakan korupsi. Menurut Muh.Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance* adalah suatu bentuk pengendalian internal terhadap perusahaan yang telah memiliki cara utama untuk mengelola risiko yang signifikan, GCG menurut Agoes (2011:101) mendefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan dan peran Direksi,

pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Good Corporate Governace sangat berkaitan erat dengan upaya anti korupsi. Tatakelola perusahaan yang baik juga dapat disebut dengan proses yang transparan guna dalam bentuk penentuan dari adanya tujuan perusahaan, pencapaian serta penilaian kinerjanya. GCG dapat disimpulkan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai betuk perhatian kepada stakeholder serta mengatur hubungan dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan kepentingan stakeholder sesuai dengan aturan dan undang-undang. GCG dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah korupsi melalui penerapan asas responsibilitas dan transparansi menjadi kunci utama terciptannya keterbukaan informasi di dalam perusahaan.

Investor dapat mempertimbangkan informasi terkait adanya kebijakan anti korupsi didalam perusahaan, oleh sebab itu mereka mulai mengetahui bahwa adanya kasus korupsi yang melibatkan perusahaan tersebut, adanya dampak pada pengembalian didalam perusahaan yang tidak pasti untuk investor tersebut. Adanya perusahaan yang semakin didorong untuk menerapkan kebijakan dalam memerangi praktik korupsi dan strategis pencegahan korupsi dapat dimasukan sebagai bagian dari praktek tanggung jawab sosial perusahaan dan dikomunikasikan kepada semua bagian perusahaan (Karim,2016). Sebagai pemasok korupsi, korporasi yang menjadi masalah sekaligus bagian dari adanya kasus korupsi. Adanya rasa kesadaran didalam perusahaan yang melawan kasus korupsi tercermin dari berbagai hal dimana salah satunya adanya pengungkapan anti korupsi yang ada di dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan anti korupsi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan adanya komitmen didalam perusahaan untuk memerangi tindak kasus korupsi. Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi merupakan masalah yang serius di Indonesia. Pengungkapan anti korupsi merupakan aspek penting yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk mencegah, memantau, dan membrantas korupsi. United Nations Global Compact (2011) mengatakan bahwa

adanya perusahaan yang harus memiliki kebijakan anti korupsi yang secara detail dan memiliki sistem manajemen ataupun prosedur adanya pencegahan korupsi. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran dengan No 032/SEJOK.04/2015 yang merekomendasikan perusahaan terbuka untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi didalam laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian masih banyak atau belum banyak adanya perusahaan yang mengungkapkan kebijakan anti korupsi didalam laporan tahunan perusahaan tersebut. Pengungkapan kebijakan anti korupsi sangat diperlukan agar para pemangku kepentingan mengetahui upaya perusahaan dalam menciptakan bisnis yang ber-etika dan upaya untuk menjaga kepentingan stakeholder nya.

Menurut Wartick dan Corhan (1985) dalam Nor Hadi (2011:21) memberitahukan bahwa adanya perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mengupayakan kebijakan yang seimbang dengan adanya sebuah keputusan atau tindakan yang sesuai dengan adanya tujuan ataupun kepentingan yang melibatkan nilai didalam masyarakat (*stakeholder*). Orientasi perusahaan harusnya bergeser dari yang diorientasikan untuk stakeholder dengan bertitik pada tolak ukuran kinerja ekonomi semata, kearah kesinambungan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan dampak sosial. Danu (2001) menyatakan bahwa adanya, pergeseran orientasi di dalam dunia bisnis *shareholder* kepada *stakeholder* telah disebut sebagai penyebab munculnya isu tanggung jawab social perusahaan. Anti korupsi memaparkan kebijakan mengenai larangan suap, anti grafikasi, kerjasama dengan KPK untuk melawan grafikasi, serta membentuk dan menerapkan sistem *whistleblowing*. Korupsi menurut Mubyartono (2001) adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyetuh keabsahan atau legitimasi pemerintah dimata generasi muda, kaum elit yang terdidik dan para pegawai pada umumnya. Whistleblowing system memberikan kesempatan luas bagi seluruh elemen bangsa untuk berperan penting serta untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dalam Guidelines on whistleblowing, komisi anti korupsi internasional Chamber of Commerce menyebutkan bahwa whitstleblowing system merupakan

alat bantu deteksi kecurangan yang efisien dan sebagian dari program internalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap diri pegawai perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ( Tirtasari dan Hartomo) (2019) dengan judul “ Pengaruh GCG dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan kebijakan Anti Korupsi” Studi Empiris Semua Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2017. Untuk Variabel Independen, Pengungkapan Kebijakan Anti Korupsi, Independensi Dewan Komisaris, Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Risiko Industri , dan Keberagaman Gender dalam Anggota Komisaris. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari tatakelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi didalam perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat dicerminkan dari empat variable yaitu independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional dan keberagaman gender dalam anggota komisaris. Sedangkan karakteristik perusahaan dicerminkan oleh ukuran perusahaan dan Risiko industri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yakni terdapat pada objek penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai 2017, pada penelitian selanjutnya ini menggunakan objek perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk menggunakan Objek Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PENGARUH GCG DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KECENDERUNGAN MENGUNGKAPKAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini dapat terarah dan memberikan hasil yang maksimal, maka penelitian ini mengarahkan dan memfokuskan penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan objek Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Ruang lingkup penelitian ini adalah menguji apakah Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Antikorupsi Berpengaruh terhadap GCG dan Karakteristik Perusahaan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Independensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi ?
2. Apakah Kompetensi Komite Audit berpengaruh terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi ?
5. Apakah Risiko Industri berpengaruh Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi ?
6. Apakah Keberagaman Gender dalam Anggota Komisaris berpengaruh Terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara Independensi Dewan Komisaris terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi
2. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara Kompetensi Komite Audit terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi
3. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara Kepemilikan Institusional terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi
4. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi
5. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara Risiko Industri terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi
6. Untuk membuktikan secara empiris adanya pengaruh antara Keberagaman Gender dalam Anggota Komisaris terhadap Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini adalah:

### **1.5.1 Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dan mampu untuk dijadikan sebagai bahan acuan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan tanggung jawab perusahaan pada laporan tahunan.

### **1.5.2 Bagi Stakeholder**

Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder tentang mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat memberikan masukan untuk pengambilan keputusan kepada pemegang saham pada perusahaan.

### **1.5.3 Bagi Masyarakat Umum/Akademis**

Untuk memberikan informasi yang bermanfaat, serta dapat menambah pengetahuan tentang mengungkapkan kebijakan anti korupsi dan tanggung jawab yang dilakukan perusahaan . Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### **1.5.4 Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai mengungkapkan kebijakan anti korupsi serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Kecenderungan Mengungkapkan Kebijakan Anti Korupsi, Karakteristik Perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka Pemikiran, dan bangunan Hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang variable-variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi tentang uraian deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan serta memberikan implikasi penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang referensi buku, jurnal dan skripsi yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka penelitian

## **LAMPIRAN**

Pada bagian ini tentang lampiran populasi dan sampel penelitian serta data penelitian hasil dari olahan data menggunakan program SPSS Versi 20.